

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Bank

Pada dasarnya bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkan menurut Joseph Sinkey dalam buku Taswan “Manajemen Perbankan” (2010:6) menyatakan bahwa :

“Bank adalah *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan.”

Menurut Dictionary of Banking and financial service by Jerry Rosenberg dalam buku Taswan “Manajemen Perbankan” (2010:6) juga berpendapat bahwa:

“Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.”

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang meliputi tiga usaha utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dan masyarakat, dan memberikan jasa lainnya.

## 2.2 Jenis Bank

Terdapat beberapa kategori jenis bank di Indonesia, yaitu :

a. Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998:

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam praktiknya, kegiatan usahanya juga ada yang murni berbasis bunga, murni berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional (sistem bunga) dengan syariah.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten saja. BPR tidak dibolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral. Dengan demikian penghimpun dana hanya boleh dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang berbasis bunga, berbasis syariah.

b. Jenis Bank Dilihat Dari Fungsinya:

- 1) Bank Komersial, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito lancar (giro) dan deposito berjangka dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- 2) Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Bank pembangunan di Indonesia terdiri dari Bank Pembangunan Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Pembangunan Swasta, dan Bank Pembangunan Koperasi.
- 3) Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Bank tabungan ini terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Swasta, dan Bank Tabungan Koperasi.

c. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya:

- 1) Bank Pemerintah Pusat, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat.
- 2) Bank Pemerintah Daerah, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.

- 3) Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- 4) Bank Swasta Asing, yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.
- 5) Bank Swasta Campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta domestik dan swasta asing.

d. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Devisa:

- 1) Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. Contoh: Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA.
- 2) Bank Non Devisa, yaitu bank yang tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli, dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. Contoh: Bank BPD tertentu.

e. Jenis Bank Berdasarkan Dominasi Pangsa Pasarnya:

- 1) *Retail Banking*, bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi. Contoh: BCA, BRI, dan sebagainya.
- 2) *Wholesale Banking*, yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi. Contoh: Bank BNI sebelum krisis 1997 mayoritas kredit diberikan kepada konglomerat.

## 2.3 Fungsi, Tujuan, dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

### 2.3.1 Fungsi BPR

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bab II Pasal 3 (2004 ; 225) dikemukakan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dari kalimat diatas diketahui bahwa fungsi BPR tidak berbeda jauh dengan fungsi bank umum lainnya, hanya saja dalam menghimpun dana masyarakat BPR tidak melaksanakan transaksi kliring, oleh karena itu BPR hanya menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito.

### 2.3.2 Tujuan BPR

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

### 2.3.3 Usaha BPR

Berdasarkan buku Taswan “Manajemen Perbankan” (2010:6), Usaha BPR terbagi atas Usaha Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

#### a. Usaha BPR Konvensional:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- 2) Memberikan kredit
- 3) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

b. Usaha BPR Syariah:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - a). Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - b). Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a). Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
  - b). Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad mudharabah, salam, atau istishna.
  - c). Pinjaman berdasarkan akad qardh.
  - d). Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
  - e). Pengambil-alihan hutang berdasarkan akad hawalah.

- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

#### 2.4 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum*. *Credere* dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara *creditum* dari bahasa Latin yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Arti kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit atau sebaliknya tidak ada calon nasabah menyepakati kredit, sebab pemberian kredit oleh bank mempunyai nilai ekonomi kepada nasabah perorangan atau badan usaha. Nilai ekonomi yang akan diperoleh nasabah debitur dan kreditur (bank) harus disepakati sejak awal (ada komitmen) tanpa merugikan salah satu pihak. Nilai ekonomi atas kredit yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Pengertian kredit yang telah kaprah (umum) digunakan di Indonesia adalah menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (revisi UU no.14

Tahun1992) yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas, secara umum kredit dapat diartikan sebagai penerimaan pinjaman uang/barang dari kreditur kepada debitur dimana debitur akan mengembalikan uang/barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

## 2.5 Sasaran dan Tujuan Kredit

Berdasarkan buku Taswan “Manajemen Perbankan” (2010:6) mengemukakan: Proses perkreditan dilakukan secara hati-hati oleh bank dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian kredit. Ketika bank menetapkan keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, terarah, dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam arti bahwa bank akan dapat menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah maksudnya adalah bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang telah ditetapkan, dan menghasilkan berarti pemberian kredit tersebut harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur dan masyarakat umumnya.

Tujuan pemberian kredit minimal akan memberikan manfaat pada:

- a). *Pertama adalah bagi bank*, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit



diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

- b). *Kedua adalah bagi debitur*, yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.
- c). *Ketiga adalah bagi masyarakat (negara)*, yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu bagi negara bahwa kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan.

## 2.6 Fungsi Kredit

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian menurut Kasmir (2008:105) antara lain adalah sebagai berikut:

- a). Untuk meningkatkan daya guna uang.

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b). Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke suatu wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain. Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari wilayah satu ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar tersebut dapat meningkatkan jumlah barang.

c). Untuk meningkatkan daya guna barang

Hasil perkembangan kredit, akan digunakan oleh debitur untuk mengolah barang tidak berguna menjadi barang yang lebih berguna.

d). Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat digunakan untuk menambah atau memperlancar jumlah peredaran barang.

e). Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan adanya kredit, yang disalurkan akan membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f). Untuk meningkatkan gairah berusaha.

Bagi debitur tentu dapat meningkatkan gairah usahanya, karena pemberian kredit ini debitur mendapatkan tambahan dana untuk membangun usaha tersebut.

g). Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika kredit yang diberikan untuk

membangun perusahaan baru, maka perusahaan tersebut membutuhkan tenaga baru. Dengan adanya lapangan pekerjaan ini para pekerja mendapatkan pendapatan berupa gaji, sehingga mengurangi pengangguran.

h). Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

## 2.7 Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit atas dasar tujuan penggunaannya menurut Totok dan Sigit dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”, kredit dapat dibedakan menjadi:

a). Kredit Modal Kerja (KMK)

KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kredit modal kerja nasabah. Sebagai contoh, apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan sembako, honor supir truk yang mengangkut sembako, pembelian solar untuk menjalankan truk, tagihan listrik di kantor, dan lain-lain. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah. Ditinjau dari jangka waktu perputaran modal kerja nasabah. Ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:

1) KMK- *Revolving*

Apabila kegiatan usaha debitur dapat diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan pihak bank cukup memercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka fasilitas KMK

nasabah dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru. KMK semacam ini disebut sebagai *KMK-Revolving*. Bank hanya perlu secara berkala meninjau kinerja nasabah berdasarkan laporan kegiatan usaha yang wajib diserahkan nasabah secara rutin. Hanya apabila pihak bank mulai meragukan kinerja nasabah, maka bank dapat saja meninjau kembali pemberian fasilitas *KMK-Revolving* kepada nasabah.

2) *KMK-Einmaleg*

Apabila volume kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan atau pihak bank kurang memercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka pihak bank merasa lebih aman kalau memberikan *KMK-Einmaleg*. Fasilitas KMK ini hanya diberikan sebatas satu kali perputaran usaha nasabah, dan apabila periode selanjutnya nasabah menghendaki KMK lagi maka nasabah harus mengajukan permohonan kredit baru. KMK jenis ini juga dapat diberikan kepada debitur yang kegiatan usahanya sangat tergantung pada proyek yang diperoleh.

b). Kredit Investasi (KI)

Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan sembako misalnya, KI dapat digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan untuk kantor, komputer untuk kantor, truk pengangkut sembako, dan lain-lain. KI biasanya

berjangka menengah atau panjang, karena nilainya yang relatif besar dan cara pelunasan oleh nasabah melalui angsuran.

c). Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah. Penggunaan kredit ini misalnya untuk pembelian mobil, rumah, dan barang-barang konsumsi yang lain. Kredit jenis ini sering kali juga diberi nama kredit multiguna, yang berarti bisa digunakan untuk berbagai tujuan oleh nasabah.

## 2.8 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Menurut buku *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah* karangan *Suhardjono*, ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha kecil menurut UU No.9 Tahun 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/9/Bkr Tahun 2001 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp1 Milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp200 juta. Kedua, menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Sedangkan definisi usaha menengah menurut Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1999 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, lebih besar dari Rp200 juta sampai dengan lebih banyak Rp10 milyar. Definisi ini masih menjadi perdebatan diantara para pelaku ekonomi, khususnya bank-bank, karena bank dalam memberikan kredit sangat bergantung pada besarnya omset penjualan aset tahun bukan pada besarnya aset.

## 2.9 Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah

Menurut buku *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah* karangan *Suhardjono* Adapun karakteristik dari Usaha Kecil dan Menengah adalah:

- a) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- b) Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
- c) Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum.

## 2.10 Metode Perhitungan Angsuran Bunga kredit

Ada berbagai macam metode perhitungan bunga kredit yang biasa digunakan. Menurut buku *Manajemen Perbankan karangan Taswan, SE., M.Si., 2010*, metode tersebut adalah sebagai berikut:

### 2.10.1 *Effective Rate atau Pembayaran Anuitas*

Praktik perkreditan umumnya menetapkan angsuran pokok dan bunga secara konstan selama masa kredit. Sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap disebut anuitas. Dengan metode ini nominal angsuran bunga setiap periode akan menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat. Angsuran pokok dan bunga bila dijumlah setiap periode adalah sama besarnya.

- a) Anuitas Pembayaran Pada Setiap Akhir Periode Angsuran (Postnumerando)

Kredit dengan angsuran postnumerando umumnya untuk kredit tunai.

Kredit tunai maksudnya kredit yang direalisasi dalam bentuk uang,

Contoh: kredit modal kerja, kredit investasi, dan lain-lain.

Anuitas bisa diperhitungkan dengan rumus:

$$A = (M \times i) / 1 - (1+i)^{-n}$$

Keterangan:

A = Anuitas

M = Nilai Kredit

i = Tingkat Suku Bunga

n = Jangka waktu kredit

angsuran pokok pertama bisa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:  $a_1 = A / (1 + i)^n$  atau  $a_1 = A - (M \times i)$ , dimana  $M \times i$  adalah angsuran bunga pertama ( $b_1$ ). Selanjutnya untuk menghitung angsuran pokok ke- $n$  atau  $a_n$  dapat ditentukan dengan rumus :  $a_n = a_1 (1 + i)^{n-1}$ , dengan asumsi angsuran pokok pertama diketahui. Dengan demikian untuk menentukan angsuran bunga ke- $n$  atau  $b_n$  bisa digunakan rumus :  $b_n = A - a_n$ . Bila diketahui angsuran pokok pertama, maka anuitas bisa ditentukan sebagai berikut :  $A = a_1 \times (1 + i)^n$

b) Angsuran Kredit Diterima Setiap Awal Bulan (Prenumerando)

Bank juga memberikan kredit non tunai seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit mobil dan sebagainya. Untuk kredit-kredit tersebut baik di bank maupun lembaga pembiayaan lainnya akan menggunakan bunga efektif dengan angsuran *prenumerando* (awal bulan). Misal kalau nasabah mengambil KPR tentu akan dibebani uang muka (*down payment*) dan angsuran perdana pada saat akad kredit ditandatangani. Pola pembayaran ini sebenarnya si nasabah membayar angsuran di awal bulan. Untuk menentukan angsuran perbulan bila kredit diangsur setiap awal bulan maka menggunakan rumus:

$$A = \frac{M}{[(1 + i)^n - 1] / i}$$

Keterangan:

A = Anuitas

M = Nilai Kredit



$i$  = Tingkat Suku Bunga

$n$  = Jangka Waktu Kredit

### 2.10.2 *Sliding Rate*

Untuk *sliding rate*, angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama setiap angsuran, sedangkan bunga diperhitungkan menurun sejalan berkurangnya sisa kredit. Dengan demikian total angsuran pokok dan bunga adalah semakin berkurang selama periode angsuran.

Rumus yang digunakan untuk menentukan angsuran pokok adalah sebagai berikut:

$$A = M : n$$

Sedangkan untuk menentukan angsuran bunga bisa ditentukan sebagai berikut:

$$B_1 = M \times i$$

$$B_2 = (M - a) \times i$$

$$B_n = [M - (a \times (n - 1))] \times i$$

Keterangan:

$A$  = Angsuran pokok

$M$  = Plafond kredit

$N$  = Periode kredit

### 2.10.3 *Flat Rate*

Perhitungan bunga dengan *flat rate* didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Dengan demikian untuk menentukan angsuran pokok dan bunga sangat sederhana. Praktik di bank bila menggunakan *flat rate* umumnya akan menentukan tingkat suku

bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan *effective rate* ataupun *sliding rate*. Sebab, bila menentukan tingkat suku bunga yang sama seperti pada *sliding* atau *effective rate*, maka total angsuran menjadi terasa sangat mahal. Rumus untuk menentukan angsuran pokok dan bunga adalah:

$$\text{Total Angsuran} = \left[ M + \left( M \times i \times t \right) \right]$$

$$N$$

Keterangan:

M = Plafond Kredit

i = Tingkat Suku Bunga

t = Jangka Waktu Kredit

N = Jumlah Bulan Angsuran Masa Kredit

#### 2.10.4 *Floating Rate*

Sistem ini umumnya digunakan untuk menghitung bunga bagi nasabah prima, kredit berjangka panjang dan dibiayai oleh pasar uang. Oleh karena itu *floating rate* dihitung dari suku bunga pasar uang dalam negeri maupun pasar uang internasional.

#### 2.10.5 *Discounted Rates*

Metode ini umumnya digunakan untuk menghitung penempatan/penjualan surat berharga di pasar uang. Penempatan/penjualan surat berharga dikenakan syarat *outright* dan *repurchase agreement*. *Outright* berarti penjualan surat berharga berdasarkan sisa jatuh waktu. Sedangkan *repurchase agreement* berarti penjual surat berharga wajib membeli kembali pada saat jatuh tempo. Mengingat

syarat *outright* tersebut, maka perhitungan bunga menggunakan *discounted rates* adalah dengan rumus :

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 \times (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})}$$